



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : STAF AHLI
SUB UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI KESEHATAN DAN GLOBALISASI**
3. NHK : **149643**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/96 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
2. Tanah Seluas 5600 m2 di BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 25.57 m2/25.57 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 595.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.950.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 3.200.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 3.750.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA SONIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 299.759.768**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.820.709.768**III. HUTANG** Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.820.709.768

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.